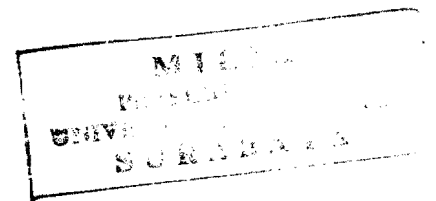


KIK  
Per 12/01  
Juk  
P

***Skripsi***

***Tri Cahya Indarta***

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI  
DALAM LELANG DI INTERNET**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM LELANG DI INTERNET**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**Dosen Pembimbing,**

**A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.**

**NIP. 131878393**

**Penyusun**

**Tri Cahya Indarta**

**NIM. 039614385**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

- a. Di dalam lelang di internet, hubungan hukum yang terjadi diantara para pihaknya adalah jual beli. Disini jual beli itu sendiri merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yaitu perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum pada saat telah terjadi kesepakatan diantara para pihaknya. Lelang di internet ini, kesepakatan yang terjadi adalah pada saat pembeli atau konsumen menjadi pemenang dalam penawaran tertinggi atas produk yang telah dilelang di dalam situs lelang di internet. Setelah kesepakatan itu terjadi maka akan dilanjutkan dengan penegasan bahwa para pihak benar-benar menginginkan hubungan hukum itu terjadi. Dari hubungan hukum yang terjadi tersebut akhirnya menghasilkan hak dan kewajiban para pihak, baik yang berasal dari perikatannya ataupun undang-undang. Dari sini dapat diketahui bahwa kedudukan konsumen relatif lebih rendah dibandingkan dengan pengusaha lelang.
- b. Dari keadaan (posisi) pembeli sebagai konsumen yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pengusaha ini nantinya dapat berakibat penyimpangan atas perikatan yang terjadi dan perbuatan-perbuatan curang yang akhirnya dapat merugikan konsumen. Akibat dari semua

itu konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti karugian kepada pengusaha sebagai pihak yang bertanggung jawab.

## 2. Saran

- a. Karena metode jual beli lelang ini masih tergolong baru dalam dunia bisnis di Indonesia maka sosialisasi dari Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) perlu dipergencar demi melindungi kepentingan konsumen .
- b. Untuk mengakomodasi kepentingan konsumen, secepatnya pemerintah membentuk badan-badan yang telah di jelaskan dalam UUPK , sehingga fungsi pemerintah untuk mengawasi dan melindungi rakyatnya bisa lebih dioptimalkan.